



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 10/KEP/DPRD/III/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu membentuk Panitia Khusus pembahas Rancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 58);

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 022/F-PDIP/III/2026, tanggal 17 Maret 2026, perihal Nama Utusan Fraksi Sebagai Anggota Pansus;
 2. Surat Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14/F.Gerindra/III/2026, tanggal 17 Maret 2026, perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 3. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14/K-PKS/III/2026 tanggal 17 Maret 2026, perihal Pengiriman Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 4. Surat Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 03/FP-NasDem/DPRDKotaYka/III/2026, tanggal 17 Maret 2026, perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 5. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 090/FPG-KOTA/III/2026 tanggal 17 Maret 2026 perihal Utusan Fraksi Partai GOLKAR sebagai Anggota Pansus;
 6. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 005/F.PAN/III/2026 tanggal 17 Maret 2026 perihal Utusan Pansus;
 7. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 002/F-PPP/JOG/III/2026 tanggal 17 Maret 2026 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

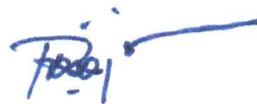
- a. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota Yogyakarta atau pihak lain yang terkait; dan
- c. menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Maret 2026

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



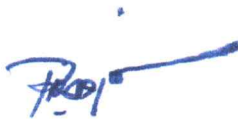
RM. SINARBIYATNUJANAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR: 10/KEP/DPRD/III/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Munazar, M.Psi.	Ketua/Anggota	PARTAI GOLKAR
2	Tri Waluko Widodo, A.Md.	Wakil Ketua/Anggota	PAN
3	Endro Sulaksono	Anggota	PDI-P
4	H. Danang Rudiyatmoko	Anggota	PDI-P
5	Subagyo	Anggota	PDI-P
6	Krisnadi Setyawan	Anggota	PARTAI GERINDRA
7	Nurcahyo Nugroho	Anggota	PKS
8	Fajar Kurniawan, S.IP.	Anggota	PKS
9	H. Setyaji Hermawan	Anggota	PPP
10	I Dewa Putu Adhi Yogana, S.S.	Anggota	PPP
11	Choliq Nugroho Adji	Anggota	PARTAI NASDEM
12	Oleg Yohan	Anggota	PARTAI NASDEM

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



RM. SINARBIYATNUJANAT